

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang dilakukan oleh Balai TNGC, dapat disimpulkan dalam beberapa hal diantaranya:

1. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai berwenang dalam melindungi hutan di Kawasan TNGC yang dilakukan dengan yang mengedepankan prinsip kelestarian alam dengan pemanfaatan ekologi, sosial, maupun ekonomi. Pengelolaan ekologis ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan ekonomi bertujuan untuk pencapaian nilai pemanfaatan hutan untuk peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan. Dan pengelolaan sosial budaya dimaksudkan untuk menguatkan status masyarakat dengan kearifan lokalnya dan berinteraksi membangun nilai-nilai dengan ekosistem TNGC.
2. Dalam rangka melindungi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai TNGC melakukan beberapa tindakan, diantaranya ialah melalui sosialisasi dan edukasi, serta tindakan pencegahan. Tindakan sosialisasi dan edukasi, salah satunya dilakukan melalui program *Camp Fire Care*. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi. Sedangkan tindakan pencegahan dilakukan melalui pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak hutan di kawasan TNGC. Dengan adanya pengawasan terhadap hutan TNGC diharapkan kegiatan-kegiatan yang merusak hutan TNGC dapat diketahui, dicegah dan ditanggulangi.
3. Kewenangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam mengelola hutan juga sejalan dengan perintah Allah, bahwa untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Allah SWT untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar (sesuai dengan kebutuhan) dan bertanggungjawab.

B. Saran

Kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai menjadi salah satu hambatan dalam upaya melindungi hutan di kawasan TNGC. Pada kenyataannya, pemerintah pusat masih memainkan peran dominasi dalam pengelolaan TNGC. Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi yang seimbang antar Pemerintah Pusat, daerah, maupun dengan masyarakat sebagai subjek dan objek implementasi kebijakan.

Selain itu, agar kegiatan perlindungan hutan di kawasan TNGC dalam berjalan dengan efektif. Diperlukan saran dan prasarana yang memadai. Serta perlu adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menangani permasalahan kerusakan hutan yang kerap kali terjadi di kawasan TNGC.

